

PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD BERKONSEP VALUE FOR MONEY DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DI SKPD KOTA PALEMBANG

Oleh

Nurul Hutami Ningsih
Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palembang
(Prodi Akuntansi Fakultas FEB UMP)
Email : nurulhutaminingsih@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 24 April 2017

Direview : 28 April 2017

Disetujui : 05 Mei 2017

ABSTRACT

This study aims to determine and analyse the effect of the knowledge on accountability, transparency and control in the implementation and administration of APBD and the effect of government accounting standard (moderating variable) on its relation between knowledge on accountability, transparency and control in the implementation and administration of APBD using value for money concept. The data used is primary data in form of questionnaires and secondary data in form of organisational structure, vision and mission of SKPD and government institution of performance accountability report (LAKIP). This study is conducted in 29 SKPD in Palembang on 5 officers of Budget Users/User Items in each SKPD. The data analysis used is Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS v.23.

The result shows that the knowledge on accountability (X_1) and control (X_3) are significant in affecting the implementation and administration of APBD using value for money (Y) concept, meanwhile the knowledge on transparency (X_2) is found to be insignificant. Meanwhile, the government accounting standard (SAP) (X_4) is not significant in moderating the relation between the knowledge on accountability (X_1), transparency (X_2) and Control (X_3) on the implementation and administration of APBD using value for money concept (Y) and the moderating relation found is moderator predictor. The effect of accountability (x_1), transparency (X_2) and control (X_3) on the the implementation and administration of APBD using value for money (Y) using Government Accounting Standard are found to be strong in which its adjusted R square is 0.774 or 77.4% meanwhile the rest 23.6% is explain by other factors outside the study.

Keywords *accountability, transparency, control, implementation and administration of apbd, value for money, government accounting standard.*

PENDAHULUAN

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik (Mardiasmo, 2001). Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah

penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan

bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Seluruh kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi (Solikin, 2006).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, partisipasi dalam pembuatan kebijakan sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia bisnis.

Kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah ditandai dengan adanya desentralisasi. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diperlukan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Melalui PP No. 24 tahun 2005, pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), SAP menjadi pedoman pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga *good governance* dapat tercapai.

Fenomena yang dapat diamati dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi oleh organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2005).

Menurut Mardiasmo (2001), pengawasan keuangan daerah merupakan tahap integral yang mencakup segala keseluruhan tahap baik pada tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan keuangan daerah yang dijalankan merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus penyusunan anggaran karena pengawasan merupakan bagian vital dalam pengawasan pelaksanaan program yang dijalankan sampai pada tahap pelaporannya.

Tercapainya pelaksanaan dan penatausahaan APBD yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan melekat). Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian APBD. Pengawasan APBD diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Fenomena pelaksanaan dan penatausahaan APBD ini terlihat bahwa informasi penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat belum didapatkan masyarakat, publik tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD hanya pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSREMBANG) dan pada tahap akhir pelaksanaan dan penatausahaan APBD, informasi dan keterlibatan publik terputus, yang artinya publik hanya dilibatkan pada saat musyawarah rencana awal APBD saja. Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas tidak sesuai

dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan.

Fenomena sehubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, standar akuntansi pemerintah, dan pengelolaan APBD adalah dalam hal pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan pelaksanaan anggaran publik tidak mendapat akses (akuntabilitas rendah), pelaksanaan anggaran yang buruk, pemborosan anggaran atau anggaran yang tidak hemat, kelambatan melaporkan keuangan serta tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan Kota Palembang beberapa periode terakhir ini oleh BPK. Pada pemeriksaan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah Kota Palembang tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Dari berbagai media yang diamati bahwa pengelolaan APBD pemerintah Kota Palembang beberapa periode terakhir ini sangat disoroti. Hal ini terlihat pada pengelolaan APBD pada penerangan jalan, pekerjaan umum, bidang sosial pengelolaan anggaran dilakukan sangat boros, tidak sesuai dengan kebutuhan publik dan menguntungkan kelompok tertentu.

Pelaksanaan dan penatausahaan APBD tidak terlepas dari pengetahuan para pengelolanya terutama di unit-unit SKPD. Dalam hal ini Pejabat SKPD yang melakukan pelaksanaan dan penatausahaan APBD adalah para pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada dikepala kita. Kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Selain pengalaman, kita juga menjadi tahu karena kita diberitahu oleh orang lain. Pengetahuan juga didapatkan dari tradisi (Bambang, 2007). Pengetahuan merupakan hasil "Tahu" dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003).

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD para pejabat SKPD masing-masing tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. SKPD merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena pengelolaan inefisiensi, kebocoran dana, pemborosan dan selalu merugi. Tuntutan baru agar SKPD-SKPD meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *value for money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan pelayanan

umum yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *value for money* masih banyaknya anggaran belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi hasil minim, anggaran digunakan tidak didasarkan pada kebutuhan/skala prioritas, penggunaan anggaran yang boros).

Seluruh SKPD seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak didasarkan pada *value for money*. *Value for money* harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dalam konteks otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel. Sebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kota Palembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan dan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang yang didalamnya memiliki 10 SKPD, yaitu :Sekretariat Daerah, Badan, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kota, Satuan, Dinas, Kantor, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal ini kecamatan dan kelurahan bukan merupakan lembaga teknis daerah sehingga tidak dimasukkan dalam ruang lingkup penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2008) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah. Populasi penelitian ini adalah anggota DPRD Propinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Disini, sampel penelitian adalah seluruh anggota DPRD yang ikut mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dan mengesahkan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah serta mengawasi pelaksanaan APBD. Hasil dari penelitian yang diperoleh:

1) Variabel pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), 2) Variabel pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh pengetahuan Dewan, dan partisipasi masyarakat, 3) Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD, dan 4) Variabel transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Coryanata (2007) akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dalam pengawasan keuangan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap anggota dewan dalam mempertanggung-jawabkan laporan

keuangan (pengawasan keuangan) dengan adanya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh anggota dewan maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan kepada anggota dewan atas kapabilitasnya dalam menjalankan tugasnya salah satunya sebagai pengawas keuangan. Menurut penelitian Werimon,dkk (2007), pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), interaksi antara pengetahuan dewan terhadap partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD.

Hasil penelitian menurut Pramita dan Andriyani (2010), pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian diatas yang akan meneliti pengetahuan pejabat SKPD tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003), Basri (2008), Coryanata (2007), Pramita dan Andriyani (2010) adalah dalam hal penggunaan variabel dependen (pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money*) dan independen (pengetahuan tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan) dan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini dilakukan kepada para pejabat SKPD di kota Palembang bukan anggota dewan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan para pejabat SKPD tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money*.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Hubungan formal akuntabilitas dalam *private sector* ataupun *public sector* salah satunya adalah hubungan *principal* dengan *agent*, dimana *agent* memegang tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dan mendapat arahan dari *principal* (Mulgan, 2000 dalam Mack dan Ryan, 2006). Di organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk

pemerintahan daerah di Indonesia, apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. *Agency theory* yang terkait dengan pemerintahan dalam hubungan *agent* dan *principal* lebih menekankan pada penentuan yang lebih baik mengenai efisiensi dalam kontrak antara *principal* dan *agent* menyangkut hal publik, organisasi dan informasi (Eisenhardt, 1989).

Akuntabilitas dalam hubungan *agent* dan *principal* menjadi penting untuk menunjukkan bahwa *agent* telah melakukan sesuatu sesuai dengan arahan *principal*. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas (Mardiasmo, 2006).

Dalam kaitannya dengan pengetahuan tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan, bahwa penetapan mekanisme pemeriksaan sangat penting dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh *agent* dalam hal ini para pejabat SKPD benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan (Triyuwono dan Roekhudin, 2000). Pengetahuan dan mekanisme tentang akuntabilitas dan transparansi dalam hal ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Pengawasan yang independen terhadap keakuratan informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen dapat mengurangi resiko stakeholders terkait dengan adanya kos agensi (Otley dan Bernard, 1996).

Pengetahuan dan Persepsi

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada di kepala kita. Kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Selain pengalaman, kita juga menjadi tahu karena kita diberitahu oleh orang lain. Pengetahuan juga didapatkan dari tradisi (Bambang, 2007).

Didalam pengetahuan terdapat persepsi yang masuk dalam tingkatan aspek psikomotor, yang dapat memberikan pengaruh atas hasil pengetahuan seseorang. Dalam penelitian ini pengetahuan pejabat SKPD tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* dapat diketahui dengan memberikan persepsinya.

Pengetahuan tentang Akuntabilitas

Secara umum dalam setiap pengelolaan APBD selalu di kaitkan dengan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi

dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Pengetahuan tentang Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance (Mardiasmo, 2006). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Adanya ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Menurut Mardiasmo (2001), pengawasan keuangan daerah merupakan tahap integral yang mencakup segala keseluruhan tahap baik pada tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan keuangan daerah yang dijalankan merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus penyusunan anggaran karena

pengawasan merupakan bagian vital dalam pengawasan pelaksanaan program yang dijalankan sampai pada tahap pelaporannya.

Pengetahuan tentang Pengawasan

Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen. Menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi. Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Menurut Mardiasmo (2001), pengawasan keuangan daerah merupakan tahap integral yang mencakup segala keseluruhan tahap baik pada tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan keuangan daerah yang dijalankan merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus penyusunan anggaran karena pengawasan merupakan bagian vital dalam pengawasan pelaksanaan program yang dijalankan sampai pada tahap pelaporannya.

Konsep Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah

Istilah keuangan daerah tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam arti luas, anggaran daerah atau anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: 1) instrumen politik, 2) instrumen kebijakan fiskal, 3) instrumen perencanaan dan 4) instrumen pengendalian (Halim, 2001). Sedangkan menurut Noordiawan, Putra, Rahmawati (2007) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai: 1) alat perencanaan, 2) alat pengendalian, 3) alat kebijakan fiskal, 4) alat politik, 5) alat koordinasi dan komunikasi, 6) alat penilaian kinerja, 7) alat motivasi dan alat menciptakan ruang publik.

Mardiasmo (2002) memberikan fungsi anggaran dengan hal yang sama dengan Noordiawan dengan kawan-kawan. Menurut Muindro (2008) fungsi anggaran adalah sebagai: 1) pedoman pemerintah dalam mengelola Negara dalam periode mendatang, 2) alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah, 3) alat pengawasan terhadap kemampuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas bahwa anggaran berfungsi sebagai perencanaan, pengendalian, kebijakan, alat politik dan penetapan tentang apa yang akan dilakukan pada periode tahun berikutnya yang berpengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bagian ke empat pasal 10, bagian kelima pasal 11, bagian keenam pasal 12, bagian ketujuh pasal 13, dan bagian kedelapan pasal 14 bahwa Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang terdiri dari: 1) Kepala SKPD, 2). Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, 5) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran. Masing-masing pejabat pengelola anggaran/pengguna barang tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Good Governance (Pemerintahan yang Baik)

Pengertian *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Good governance* dapat tercapai apabila beberapa hal dibawah ini dipedomani dalam pengelolaan APBD. Selanjutnya Mardiasmo (2006) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi, akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan.

Konsep *Good Governance*, *Good Financial Governance* merupakan konsep baru yang di adopsi dari luar diperkenalkan di Indonesia oleh lembaga-lembaga donor World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan United Nation Development Program (UNDP). *Good Governance* sebagai suatu kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum yang baik.

Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan APBD terdiri dari: 1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah, 2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, dan 3) Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Dalam penatausahaan keuangan daerah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Penatausahaan APBD dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam suatu unit SKPD. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor tersebut dilakukan dengan cara:

1. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
2. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Setelah DPA-SKPD ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas tersebut memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Value for Money

Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* (VFM) dalam menjalankan aktivitasnya. Renyowijoyo (2008), Mardiasmo (2006) menyatakan *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomi merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya).

Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi berhubungan dengan produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Efektifitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, sedang tambahannya dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Penggunaan dana publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Standar Akuntansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Tentang Ketentuan Umum pasal 1 poin 14 mengartikan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Poin 17 mengartikan pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Point 18 mengartikan Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi di wadahi dalam satu wadah sekretariat, pengawasan di wadahi dalam bentuk inspektorat, perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di wadahi dalam lembaga teknis daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. (PP. Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah).

Peneliti Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Sopannah dan Mardiasmo (2003) meneliti dengan judul: Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. hasil diperoleh bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sopannah dan Wahyudi (2007) melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kota Malang. Hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), 2) Pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD, 3) Pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD, dan 4) Pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD.

Penelitian terdahulu di atas digunakan sebagai rujukan pada penelitian ini. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dilihat dari segi penggunaan variabelnya, ruang lingkup responden juga berbeda. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pengetahuan tentang akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money*. Berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini yang menjadi variabel pemoderasinya adalah standar akuntansi pemerintah (SAP).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan tentang akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi dan pengetahuan tentang pengawasan sebagai variabel independen yang dimiliki oleh pejabat SKPD dalam

pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* sebagai variabel dependen. Selain kedua variabel yang terkait dalam penelitian terdapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lain yang memengaruhi pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* sebagai variabel moderasi. Berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya serta variabel yang memengaruhi pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money*

Hipotesis Penelitian

1. H_0 = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan tentang akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi, dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik secara simultan maupun parsial.
2. H_1 = Terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan tentang akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi, dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik secara simultan maupun parsial.
3. H_0 = Standar Akuntansi Pemerintah tidak Memoderasi hubungan antara pengetahuan tentang akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi, dan pengetahuan tentang pengawasan dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* baik secara simultan maupun parsial
4. H_2 = Standar Akuntansi Pemerintah memoderasi hubungan antara pengetahuan tentang akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi, dan pengetahuan tentang pengawasan dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* baik secara simultan maupun parsial.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah 29 unit SKPD Kota Palembang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kota, 17 Dinas, 8

Badan, dan RSUD Palembang BARI. Respondennya adalah para Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang berjumlah 5 orang, yaitu: 1) Kepala SKPD, 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, 5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang akuntabilitas (X1), pengetahuan tentang transparansi (X2) dan pengetahuan tentang pengawasan (X3), Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai variabel moderasi (X4). Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh pengetahuan tentang akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi dan pengetahuan tentang pengawasan pejabat SKPD terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) sebagai variabel moderasi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif yaitu suatu metode yang bertujuan memahami dan merumuskan masalah-masalah penelitian, penyusunan teoritis, pengembangan hipotesis dan pengujiannya. Data yang diperoleh digunakan untuk mengklarifikasi masalah-masalah yang kurang jelas, untuk melakukan hal tersebut diperlukan pencarian data-data mengenai esensi masalah yang terjadi.

Menurut Masri dan Sofian (2002), penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan data-data tersebut dikumpulkan, diproses dan dianalisa untuk menjelaskan hubungan korelasi antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumber/responden melalui kuesioner: 1) Data diambil di Bagian Pembukuan pada Biro Keuangan SKPD Kota Palembang, 2) Kuesioner harus dapat menggambarkan definisi operasional dan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga jawaban responden atas kuesioner dapat digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel.

Skala pengukuran responden yang digunakan adalah 5 (lima) poin dengan skala likert. Asumsi yang mendasari penggunaan metode Likert menurut Azwar (2000) adalah :

1. Setiap pernyataan sikap yang telah ditulis dapat disepakati sebagai pernyataan yang setuju atau pernyataan yang tak setuju.
2. Jawaban yang diberikan oleh individu yang mempunyai sikap positif harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi dari pada yang mempunyai sikap negatif.
3. Untuk itu dalam kuesioner tersebut diberikan lima pilihan jawaban

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diambil secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu dari analisa dokumen dan studi pustaka, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung melalui pengamatan yang diperoleh dari arsip-arsip, dokumen dan penelusuran melalui internet. Pada penelitian ini, data sekunder berkaitan dengan kondisi umum lokasi penelitian, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi instansi serta keterangan mengenai pegawai pada SKPD Kota Palembang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui *survey* kuesioner terhadap para pejabat SKPD Kota Palembang. Tujuan *survey* adalah untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan pejabat SKPD tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kota Palembang.

Menurut Arikunto (2003), pada dasarnya populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Hal senada disampaikan Adimiharja (2001) yang juga berpendapat bahwa jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu obyek yang akan diteliti disebut populasi atau *universe*.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang yang meliputi 29 SKPD, yaitu : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kota, 17 Dinas, 8 Badan, dan RS Palembang BARI. SKPD tersebut dipilih atas dasar pertimbangan (*purposive*) karena merupakan lembaga teknis daerah.

Kecamatan dan kelurahan tidak dimasukkan karena bukan lembaga teknis daerah di Kota Palembang.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang merupakan pejabat pengelola dan pengguna anggaran Kota Palembang pada 29 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 5 responden dengan kriteria 1) Kepala SKPD, 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, 5) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran. Total keseluruhan populasi dalam penelitian adalah 145 responden.

Menurut Haryono (2007) sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Ada beberapa teknik di dalam pengambilan sampel, dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan keseluruhan jumlah populasi (*sampling jenuh* atau *sensus*), dengan demikian sampel penelitian ini sebanyak 145 responden yang merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di 29 SKPD di Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsure interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Analisis regresi berganda yang bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel penjelas/independen terhadap variabel tak bebas/dependen (Gujarati, 2007).

Perubahan data dari Skala Ordinal ke Skala Interval

Sebelum data dianalisis maka data yang berupa tabulasi dari skala ordinal dinaikkan ke skala interval dengan program MSI (*method successive interval*), karena data variabel independen yaitu pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1), pengetahuan tentang transparansi (X_2), dan pengetahuan tentang pengawasan (X_3), variabel moderator yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP) (X_4) yang dikumpulkan melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum diolah dan dipasangkan dengan data variabel dependen yaitu pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), data ordinal terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval (MSI)*, yaitu metode penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum SKPD Kota Palembang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Palembang mengimplemen-tasikan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kota Palembang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, kemudian diterbitkan pula Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dalam pelaksanaan Pemerintahan.

Karakteristik Responden

Penelitian ini memakan waktu selama 4 bulan mulai dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan April 2016. Penelitian dilakukan pada 29 unit SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kota, 17 Dinas, 8 Badan, dan RSUD Palembang BARI. Setiap SKPD memperoleh 5 kuesioner sehingga total kuesioner yang didistribusikan sebanyak 145 ekslembar.

Berdasarkan kuesioner yang didistribusikan diketahui bahwa 141 kuesioner (97,2%) kembali dan 4 kuesioner (2,8%) tidak kembali. Dari 141 kuesioner (97,2%) yang kembali selanjutnya diteliti lagi untuk memastikan apakah jawaban responden sudah lengkap atau belum, ternyata dari total tersebut semua jawaban lengkap.

Pengetahuan tentang Akuntabilitas (X_1)

Data mengenai pengetahuan tentang akuntabilitas diperoleh melalui 8 item pertanyaan. Responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 43 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui dengan pasti baik secara teori maupun praktek bahwa pengetahuan tentang akuntabilitas harus dimiliki oleh para pejabat SKPD. Jawaban setuju sebanyak 74 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui bahwa pengetahuan tentang akuntabilitas sangat penting dimiliki oleh pejabat SKPD. Responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 19 orang, ini berarti bahwa responden merasa ragu atas jawaban yang diberikan. Responden mengetahui tentang akuntabilitas hanya berdasarkan teori saja dan tidak meyakini bahwa dalam prakteknya telah dilaksanakan atau belum. Responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang dan yang memberikan jawaban

sangat tidak setuju sebanyak 1 orang, ini dikarenakan dalam menempuh bangku kuliah mereka tidak berasal dari lulusan ekonomi terutama akuntansi sehingga tidak mendapatkan pengetahuan tentang akuntabilitas baik secara teori maupun praktek.

Dari keseluruhan hasil yang diperoleh, berarti bahwa responden telah memiliki pengetahuan tentang akuntabilitas dengan latar belakang pendidikan yang tinggi terutama berasal dari lulusan ekonomi/akuntansi yang dapat menunjang pekerjaannya. Responden memahami peran dan tanggungjawabnya terutama dalam kaitannya dengan akuntabilitas yang harus dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selain itu responden juga mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pengembangan keahlian guna membantu penguasaan dalam tugas yang diemban dan mendapatkan peralatan operasional yang cukup.

Pengetahuan tentang Transparansi (X_2)

Data mengenai pengetahuan tentang transparansi diperoleh melalui 8 item pertanyaan. Responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 43 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui dengan pasti baik secara teori maupun praktek bahwa pengetahuan tentang transparansi harus dimiliki oleh para pejabat SKPD. Jawaban setuju sebanyak 74 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui bahwa pengetahuan tentang transparansi sangat penting dimiliki oleh pejabat SKPD. Responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 20 orang, ini berarti bahwa responden merasa ragu atas jawaban yang diberikan. Responden mengetahui tentang transparansi hanya berdasarkan teori saja dan tidak meyakini bahwa dalam prakteknya telah dilaksanakan atau belum. Responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 5 orang dan yang memberikan jawaban sangat tidak setuju tidak ada, ini dikarenakan dalam menempuh bangku kuliah mereka tidak berasal dari lulusan ekonomi terutama akuntansi sehingga tidak mendapatkan pengetahuan tentang transparansi baik secara teori maupun praktek.

Dari keseluruhan hasil yang diperoleh, berarti bahwa responden telah memiliki pengetahuan tentang transparansi dengan latar belakang pendidikan yang tinggi terutama berasal dari lulusan ekonomi/akuntansi yang dapat menunjang pekerjaannya. Responden memahami peran dan tanggung jawabnya terutama dalam kaitannya dengan transparansi anggaran yang perlu dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi (Tupoksi) selain itu responden juga mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pengembangan keahlian guna membantu penguasaan dalam tugas yang diemban dan mendapatkan peralatan operasional yang cukup.

Pengetahuan tentang Pengawasan (X_3)

Data mengenai pengetahuan tentang pengawasan diperoleh melalui 8 item pertanyaan. Responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 44 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui dengan pasti baik secara teori maupun praktek bahwa pengetahuan tentang pengawasan harus dimiliki oleh para pejabat SKPD. Jawaban setuju sebanyak 73 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui bahwa pengetahuan tentang pengawasan sangat penting dimiliki oleh pejabat SKPD. Responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 20 orang, ini berarti bahwa responden merasa ragu atas jawaban yang diberikan. Responden mengetahui tentang pengawasan keuangan daerah hanya berdasarkan teori saja dan tidak meyakini bahwa dalam prakteknya telah dilaksanakan atau belum, selain itu juga memang tidak diikutsertakan dalam pengawasan keuangan daerah. Responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang dan yang memberikan jawaban sangat tidak setuju tidak ada, ini dikarenakan dalam menempuh bangku kuliah mereka tidak berasal dari lulusan ekonomi terutama akuntansi sehingga tidak mendapatkan pengetahuan tentang pengawasan keuangan daerah baik secara teori maupun praktek.

Dari keseluruhan hasil yang diperoleh, ini berarti bahwa responden telah memiliki pengetahuan tentang pengawasan dengan latar belakang pendidikan yang tinggi terutama berasal dari lulusan ekonomi/akuntansi yang dapat menunjang pekerjaannya. Responden memahami peran dan tanggung jawabnya terutama dalam kaitannya dengan melakukan pengawasan anggaran yang bekerja sama dengan inspektorat, BAPEDA dan DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selain itu responden juga mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pengembangan keahlian guna membantu penguasaan dalam tugas yang diemban dan mendapatkan peralatan operasional yang cukup.

Standar Akuntansi Pemerintah (X_4)

Data mengenai Standar Akuntansi Pemerintah diperoleh melalui 11 item pertanyaan. Responden yang memberikan jawaban sangat setuju

sebanyak 33 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui dengan pasti baik secara teori maupun praktek bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan setiap pejabat SKPD perlu mengetahuinya. Jawaban setuju sebanyak 64 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sangat penting diterapkan oleh pejabat SKPD dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 15 orang, ini berarti bahwa responden merasa ragu atas jawaban yang diberikan. Responden mengetahui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) hanya berdasarkan teori saja dan tidak meyakini bahwa dalam prakteknya telah dilaksanakan atau belum. Responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 17 orang dan yang memberikan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 12 orang, ini dikarenakan dalam menempuh bangku kuliah mereka tidak berasal dari lulusan ekonomi terutama akuntansi sehingga tidak mendapatkan pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik secara teori maupun praktek.

Dari keseluruhan hasil yang diperoleh, ini berarti bahwa responden telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik dan berusaha menjalankan kegiatan sesuai dengan pedoman SAP yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang tinggi yang dapat menunjang pekerjaannya. Responden memahami peran dan tanggungjawabnya terutama dalam kaitannya dengan hal-hal yang dilakukan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD berkonsep *Value for Money* (Y)

Data mengenai Standar Akuntansi Pemerintah diperoleh melalui 11 item pertanyaan. Responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 40 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui dengan pasti baik secara teori maupun praktek bahwa pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas yang harus diketahui oleh pejabat SKPD. Jawaban setuju sebanyak 55 orang, ini berarti bahwa responden sudah mengetahui bahwa pelaksanaan dan

penatausahaan APBD berkonsep *Value for Money* sangat penting diterapkan oleh pejabat SKPD dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 20 orang, ini berarti bahwa responden merasa ragu atas jawaban yang diberikan. Responden mengetahui pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *Value for Money* hanya berdasarkan teori saja dan tidak meyakini bahwa dalam prakteknya telah dilaksanakan atau belum. Responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 15 orang dan yang memberikan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 11 orang, ini dikarenakan dalam menempuh bangku kuliah mereka tidak berasal dari lulusan ekonomi terutama akuntansi sehingga tidak mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *Value for Money* baik secara teori maupun praktek.

Dari keseluruhan hasil yang diperoleh, ini berarti bahwa responden telah mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* dengan baik dan telah melakukan pengelolaan anggaran dengan efektif, efisien dan ekonomis agar anggaran yang telah ditetapkan dapat dialokasikan sesuai dengan yang direncanakan, dapat mencapai target dan realisasi anggaran berjalan dengan baik. Responden memahami peran dan tanggungjawabnya terutama dalam kaitannya dengan hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money*.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil uji validitas terhadap Pengetahuan tentang Akuntabilitas (X_1), bahwa semua butir pertanyaan dari variabel pengetahuan tentang akuntabilitas adalah valid, karena terbukti bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kesalahan 5%.
2. Hasil uji validitas terhadap Pengetahuan tentang Transparansi (X_2), ditarik kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan dari variabel pengetahuan tentang transparansi valid karena terbukti bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kesalahan 5%.
3. Hasil uji validitas terhadap Pengetahuan tentang Pengawasan (X_3), ditarik kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan dari variabel pengetahuan tentang pengawasan adalah valid karena terbukti bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kesalahan 5 %.

4. Hasil uji validitas terhadap SAP (X_4), ditarik kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan dari variabel SAP (variabel moderator) adalah valid karena terbukti bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kesalahan 5%.
5. Hasil uji validitas terhadap Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD berkonsep *Value for Money* (Y), ditarik kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintah adalah valid karena terbukti bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kesalahan 5 %.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrument penelitian. Butir-butir pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach alphanya* berada di atas 0,60. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada semua variabel nilai *Cronbach alphanya* berada di atas 0,60 dan juga $\geq r_{tabel}$ (0,1654) ini artinya semua variabel dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Berganda

Bagian ini menyajikan hasil regresi berganda variabel pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1), pengetahuan tentang transparansi (X_2), pengetahuan tentang pengawasan (X_3), terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), dengan Standar Akuntansi Pemerintah (X_4) sebagai variabel moderator.

Model penelitian ini menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA), karena dalam penelitian ini menggunakan variabel moderator yaitu SAP (X_4). Hasil regresi berganda dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji Asumsi Klasik

Bagian ini menguji apakah model analisis terdapat pelanggaran normalitas dan autokorelasi. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* dan uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson test*.

Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati uji statistik dari distribusi residual. Untuk mendeteksi normalitas digunakan *Kolmogorov-Smirnov test*, jika probabilitas $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika

probabilitas $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Uji Normalitas $P > 0,05$. Hasil uji mengindikasikan bahwa variabel pengetahuan tentang akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi, pengetahuan tentang pengawasan, SAP, dan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* berdistribusi normal karena nilai *Kolmogorov-Smirnov* berada di atas 0,050.

Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2006), bahwa model regresi Y yang digunakan bebas dari autokorelasi dengan nilai *Durbin-Watson* yaitu 2,157. Nilai DW berada diantara 1,55 – 2,45 yang berarti tidak ada autokorelasi dan data menunjukkan layak untuk diteliti.

Pengujian Goodness of Fit Model

Bagian ini untuk menguji ketepatan fungsi regresi dengan menggunakan uji t dan uji F . Berikut diuraikan hasil pengujian *Goodness of Fit Model*.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara individu dalam menerangkan variabel independen dengan tahapan sebagai berikut : pertama menyusun hipotesis penelitian, kedua menentukan *level of significance* yang ditetapkan sebesar 5%, ketiga pengujian parsial menggunakan SPSS Versi 23, keempat membandingkan nilai antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima dan sebaliknya apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Ternyata nilai konstanta sebesar – 0,052 dan ada satu variabel yang nilai signifikansi uji t tidak berpengaruh terhadap variabel pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) yaitu variabel pengetahuan tentang transparansi (X_2). Pengetahuan tentang transparansi (X_2), nilai t_{hitung} sebesar 1,003 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana nilai t_{tabel} sebesar 1,977 dengan nilai signifikansi 0,318 sehingga bisa diartikan H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Variabel independen lainnya yaitu variabel pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1), pengetahuan tentang pengawasan (X_3), dan SAP (X_4) nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Variabel pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) nilai t_{hitung} sebesar 2,639, variabel pengetahuan tentang pengawasan (X_3) nilai t_{hitung} sebesar 4,001, variabel SAP (X_4) nilai t_{hitung} sebesar

7,230. Nilai signifikansinya pun $< 0,050$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen dengan tahapan sebagai berikut : pertama menyusun hipotesis penelitian, kedua menentukan *level of significance* yang ditetapkan 5%, ketiga melakukan pengujian simultan menggunakan SPSS Versi 23, keempat membandingkan nilai apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima dan sebaliknya.

Nilai $F_{hitung} = 120,551 > F_{tabel} = 2,44$ dengan signifikansi sebesar 0,00 dimana $0,00 < 0,50$ yang berarti bahwa hipotesis diterima dimana model regresi yang terbentuk dapat digunakan untuk menjelaskan variabel independen dan model regresi dapat dipakai dalam memprediksi variabel pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money*.

Pengaruh Pengetahuan tentang Akuntabilitas terhadap Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD berkonsep Value for Money

Berdasarkan hasil regresi diketahui koefisien variabel pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) sebesar 0,249 yang artinya setiap penambahan pengetahuan tentang akuntabilitas sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) sebesar 0,249 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi bertanda positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), artinya apabila pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) meningkat maka pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) signifikan mempengaruhi pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang telah melaksanakan akuntabilitas yang cukup baik yang dibuktikan dengan dibuatnya LAKIP/Laporan Kinerja walaupun sering terlambat dalam waktu pelaporannya. Tingkat pengetahuan para pejabat SKPD juga sudah cukup baik yang

dilihat dari banyaknya hasil jawaban responden yang menjawab dengan kategori sangat setuju dan setuju. Mayoritas para pejabat SKPD memiliki pendidikan sarjana terutama yang berlatar belakang pendidikan ekonomi, baik itu manajemen maupun akuntansi sehingga mampu memahami peran dan tanggungjawabnya yang berkedudukan di bagian pengguna anggaran/pengguna barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Para pejabat SKPD juga mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan tentang akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Coryanata (2007), yang menyebutkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dan sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Sopanah dan Wahyudi (2007), yang menyebutkan bahwa pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD.

Pengaruh Pengetahuan tentang Transparansi terhadap Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD berkonsep *Value for Money*

Berdasarkan hasil regresi diketahui koefisien variabel pengetahuan tentang transparansi (X_2) sebesar 0,084 yang artinya setiap penambahan pengetahuan tentang transparansi sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) sebesar 0,084 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi bertanda positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara pengetahuan tentang transparansi (X_2) dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), artinya apabila pengetahuan tentang transparansi (X_2) meningkat maka pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Pengetahuan tentang transparansi (X_2) sebesar 0,318 lebih besar dari 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang transparansi (X_2) tidak signifikan mempengaruhi pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang telah melaksanakan transparansi tapi belum maksimal dibuktikan dengan tidak diperkenalkannya untuk melihat laporan keuangan pada beberapa SKPD. Tingkat pengetahuan para pejabat SKPD juga sudah cukup baik yang dilihat dari banyaknya hasil jawaban responden yang menjawab dengan kategori sangat setuju dan setuju. Mayoritas

para pejabat SKPD memiliki pendidikan sarjana terutama yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi, baik itu manajemen maupun akuntansi sehingga mampu memahami peran dan tanggungjawabnya yang berkedudukan di bagian pengguna anggaran/pengguna barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Para pejabat SKPD juga mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan tentang transparansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Basri (2008), yang menyebutkan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dan sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Pramita dan Andriyani (2010), yang menyebutkan bahwa transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Coryanata (2007), yang menyebutkan bahwa variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Pengetahuan tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD berkonsep *Value for Money*

Berdasarkan hasil regresi diketahui koefisien variabel pengetahuan tentang pengawasan (X_3) sebesar 0,339 yang artinya setiap bertambahnya pengetahuan tentang pengawasan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) sebesar 0,339 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi bertanda positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara pengetahuan tentang pengawasan (X_3) dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), artinya apabila pengetahuan tentang pengawasan (X_3) meningkat maka pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Pengetahuan tentang pengawasan (X_3) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang pengawasan (X_3) signifikan mempengaruhi pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang telah melaksanakan pengawasan yang cukup baik yang dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan Inspektorat Kota, BPKP, BAPEDA dan DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Tingkat pengetahuan para pejabat SKPD

juga sudah cukup baik yang dilihat dari banyaknya hasil jawaban responden yang menjawab dengan kategori sangat setuju dan setuju. Mayoritas para pejabat SKPD memiliki pendidikan sarjana terutama yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi, baik itu manajemen maupun akuntansi sehingga mampu memahami peran dan tanggung jawabnya yang berkedudukan di bagian pengguna anggaran/pengguna barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Para pejabat SKPD juga mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengawasan.

Pengaruh Pengetahuan tentang Akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD berkonsep Value for Money secara Simultan

Berdasarkan uji F pada tabel IV.25, diketahui nilai $F_{hitung} = 120,551 > F_{tabel} = 2,44$ dengan signifikansi sebesar 0,00 dimana $0,00 < 0,50$ yang berarti bahwa secara simultan pengetahuan tentang akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep Value for Money berpengaruh secara signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep Value for Money, para pejabat SKPD perlu memiliki pengetahuan tentang akuntabilitas, pengetahuan tentang transparansi, dan pengetahuan tentang pengawasan agar dalam pelaksanaannya dapat terwujud efektivitas, efisiensi, dan ekonomis yang semaksimal mungkin. Value for Money dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, dapat meningkatkan mutu pelayanan publik, dapat menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, serta meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memoderasi hubungan antara variabel pengetahuan tentang akuntabilitas dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep value for money

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada tabel IV.19, diketahui bahwa

koefisien variabel moderasi antara pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) dengan SAP (X_4) adalah sebesar -0,008. Koefisien yang dihasilkan bernilai negatif yang artinya moderasi dari SAP (X_4) memperlemah pengaruh dari hubungan antara pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y). Nilai signifikansi moderasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,417 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa moderasi dari SAP (X_4) antara pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) memiliki pengaruh yang tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan tabel IV.18 *output* yang dihasilkan atau nilai signifikansi dari hasil regresi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa regresi antara pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) dan SAP (X_4) dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) memiliki pengaruh yang signifikan. Dari hasil regresi yang signifikan dan hasil regresi moderasi yang tidak signifikan berikut dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi adalah *Predictor Moderator*. Hal ini berarti bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diharapkan secara teori mampu untuk bisa memoderasi ternyata hal tersebut tidak terjadi sehingga dalam uji interaksi dihitung bahwa justru Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan variabel independen, sehingga tidak dapat memperkuat hubungannya dengan pengetahuan tentang akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* sehingga perlu diterapkan dalam praktek di lapangan. Pengetahuan tentang akuntabilitas harus dimiliki oleh seluruh pejabat SKPD dikarenakan agar penyusunan LAKIP/Laporan Kinerja dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memoderasi hubungan antara variabel pengetahuan tentang transparansi dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep value for money

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada tabel IV.21, diketahui bahwa koefisien variabel moderasi antara pengetahuan tentang transparansi (X_2) dengan SAP (X_4) adalah

sebesar -0,016. Koefisien yang dihasilkan bernilai negatif yang artinya moderasi dari SAP (X_4) memperlemah pengaruh dari hubungan antara pengetahuan tentang transparansi (X_2) terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y). Nilai signifikansi moderasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,166 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa moderasi dari SAP (X_4) antara pengetahuan tentang transparansi (X_2) dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) memiliki pengaruh yang tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak.

Berdasarkan tabel IV.20 *output* yang dihasilkan atau nilai signifikansi dari hasil regresi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa regresi antara pengetahuan tentang transparansi (X_2) dan SAP (X_4) dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) memiliki pengaruh yang signifikan. Dari hasil regresi yang signifikan dan hasil regresi moderasi yang tidak signifikan berikut dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi adalah *Predictor Moderator*. Hal ini berarti bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diharapkan secara teori mampu untuk bisa memoderasi ternyata hal tersebut tidak terjadi sehingga dalam uji interaksi dihitung bahwa justru Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan variabel independen, sehingga tidak dapat memperkuat hubungannya dengan pengetahuan tentang transparansi. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* sehingga perlu diterapkan dalam praktek di lapangan. Pengetahuan tentang transparansi harus dimiliki oleh seluruh pejabat SKPD dikarenakan agar penyusunan LAKIP/Laporan Kinerja dapat menghasilkan laporan yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, informasi yang dihasilkan terbuka untuk masyarakat dan dengan adanya transparansi dapat mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memoderasi hubungan antara variabel pengetahuan tentang pengawasan dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money*

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada tabel IV.23, diketahui bahwa koefisien variabel moderasi antara pengetahuan tentang pengawasan (X_3) dengan SAP (X_4) adalah

sebesar -0,004. Koefisien yang dihasilkan bernilai negatif yang artinya moderasi dari SAP (X_4) memperlemah pengaruh dari hubungan antara pengetahuan tentang pengawasan (X_3) terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y). Nilai signifikansi moderasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,738 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa moderasi dari SAP (X_4) antara pengetahuan tentang pengawasan (X_3) dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) memiliki pengaruh yang tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan tabel IV.22 *output* yang dihasilkan atau nilai signifikansi dari hasil regresi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa regresi antara pengetahuan tentang pengawasan (X_3) dan SAP (X_4) dengan pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) memiliki pengaruh yang signifikan. Dari hasil regresi yang signifikan dan hasil regresi moderasi yang tidak signifikan berikut dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi adalah *Predictor Moderator*. Hal ini berarti bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diharapkan secara teori mampu untuk bisa memoderasi ternyata hal tersebut tidak terjadi sehingga dalam uji interaksi dihitung bahwa justru Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan variabel independen, sehingga tidak dapat memperkuat hubungannya dengan pengetahuan tentang pengawasan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* sehingga perlu diterapkan dalam praktek di lapangan. Pengetahuan tentang pengawasan harus dimiliki oleh seluruh pejabat SKPD dikarenakan untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan serta dapat mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara parsial diketahui bahwa pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1) dan pengetahuan tentang pengawasan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y), sedangkan pengetahuan tentang transparansi (X_2) berpengaruh tidak signifikan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y).
2. Secara simultan diketahui bahwa pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1), pengetahuan tentang transparansi (X_2), dan pengetahuan tentang pengawasan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y).
3. Secara parsial diketahui bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X_4) tidak signifikan memoderasi hubungan antara pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1), pengetahuan tentang transparansi (X_2), dan pengetahuan tentang pengawasan (X_3) terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) dan semua hubungan moderasi yang terjadi adalah *predictor moderator*.

Pengaruh antara pengetahuan tentang akuntabilitas (X_1), pengetahuan tentang transparansi (X_2), dan pengetahuan tentang pengawasan (X_3) terhadap pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* (Y) dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terbukti kuat dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,774 atau 77,4% sedangkan sisanya 23,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Palembang.
 - a. Diharapkan dapat mempertahankan pengetahuan tentang akuntabilitas dan pengetahuan tentang pengawasan dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* dan meningkatkan pengetahuan tentang transparansi yang belum maksimal dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang baik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang lain seperti partisipasi, hukum dan aturan, responsivitas, orientasi consensus, keadilan dan kewajaran, serta visi strategis.

- b. Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan laporan keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban yang dapat dibaca dan dipahami oleh semua masyarakat. Akuntabilitas dan pengawasan laporan keuangan pada pemerintah Kota Palembang harus dapat dipertahankan, namun transparansi terutama informasi hasil kinerja anggaran pemerintah perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam hasil publikasi laporan hasil anggarannya melalui media massa dan lembar resmi pemerintah daerah secara jujur dan terbuka.
- c. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD berkonsep *value for money* harus dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengantarkan pemerintahan menjadi pemerintahan yang lebih baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan menggunakan metode kuesioner terbuka dalam penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan dan penatausahaan APBD berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.
- b. Diharapkan adanya penambahan sampel tidak hanya dari SKPD Pemerintah Kota Palembang tetapi lebih luas baik jenis SKPD-nya maupun wilayahnya sehingga jumlah sampel dapat lebih banyak.
- c. Diharapkan juga adanya penambahan sampel yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sehingga hasil penelitian dapat lebih berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka; Hikmat, Harry; 2001. *Participatory Research Appraisal AlamPelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Bandung:Humaniora Utama Press.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep tentang*

- Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia.*
http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070511110601. Download 12 Maret 2009.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Azwar. 2000. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Basri, Yesi Mutia. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Benito, B., Montesinos, V., and Vela, Jose M. 2003. *Local and Regional Accounting and Reporting in Spain; An Empirical Outlook*. Journal of Public Budgetary Accounting & Financial Management. 15(1):67-91.
- Budiarta, Ketut, 2008. *Cara Pandang Undang Undang RI No. 40 Tahun 2007 Dan Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 Terhadap Corporate Social Responcibility (CSR)*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar: Buletin Studi Ekonomi Volume 13 Nomor 2.
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Jurnal SNA X Makasar.
- Crowdhury, Riazur R, John I, and Reza Kouhg. 2005. *The Public Sector Audit Expectation Gap in Bangladesh*. Managerial Auditing Journal. 20(8):893-908.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. *Agency Theory: An Assessment and Review*. The Academy of Management Review. 14(1):57-74
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi 3. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Haryono. (2007). *Statistika Bisnis dan Industri, Handout Mata Kuliah Statistika Bisnis dan Industri*. Surabaya: Magister manajemen Teknologi, ITS.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Aziz Alimut. (2007). *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Surabaya : Salemba Media.
- Istiyari. (2000). *Teori Pengetahuan dan Sikap*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Kaplan, Robert S. dan Anthony A. Atkinson. (1998). Edisi 3. *Advanced Management Accounting*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6).
- Mudrajad, Kuncoro. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta. Erlangga.
- Mack, Janet., and Ryan, Christine. 2006. *Reflection on the Theoretical Underpinnings of The General-Purpose Financial Reports of Australian Government Departments*. accounting, auditing and accountability journal. 19(4): 592-612.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan*

- Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.* Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1):1-17.
- Maryono, Warella, Kismartini, 2007. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.*
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.* Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Otley, David T., dan Pierce, Bernard J. 1996. *Auditor Time Budget Pressure: Consequences and Antecedents,* Accounting, Auditing and Accountability Journal. 9:31-58.
- Potton, J.M. 1992. *Accounting and Governmental Financial Reporting.* Journal of Financial Accountability and Management. Auntnm:165-180.
- Prasetyo, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya.* Rajawali Pers: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kota Palembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. 2010.
- Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah APBD (Studi Empiris pada DPRD se-Karesidenan Kedu).* Universitas Muhammadiyah Magelang. Jurnal SNA XIII.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba,* Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Umar, Sekaran. 2000. *Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Edisi Keempat. Penerjemah: Kwan Men Yon. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Solikin, Akhmad. 2006. *Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan.* Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2(2):1-15.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah.* (Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta), SNA VI Surabaya, Oktober 2003, p1160.
- Sopannah dan Wahyudi Isa. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kota Malang.* Jurnal Akuntansi.
- Stanbury, W. T. (2003). *Accountability To Citizens In The Westminster Model Of Government: More Myth Than Reality.* Fraser Institute Digital Publication: Canada.
- Sumarsono, Hadi. 2009. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah.* Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1. No 1. 2009.
- Triyuwono, Iwan & Roekhudin. 2000.

- Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 3 No. 2 Hal. 151-167.*
- Toha, Suherman, 2007. *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Werimon, Simson, dkk. 2007. Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal SNA X Makasar*.
- Aristanti, Widyaningsih dan Pujirahayu. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislative Daerah tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating*. *Jurnal Media Riset Akuntansi*, Vol.2.No.1 Februari 2012.
- Winarman, Jaka dan Sri Murni. 2007. *Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Jurnal SNA X Makasar*.